Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Transfer ke Daerah Dana Desa Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

The Effect of Regional Original Income and Transfers to Village Fund Areas on Regency/City Regional Financial Independence in Riau Province

Bulan Shalshyabilla[a]
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mahakarya Asia Yogyakarta

Famita Azzakhusna[b]
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mahakarya Asia Yogyakarta

Edy Anan[c]
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas AMIKOM Yogyakarta

Rima Lanaula[d]
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mahakarya Asia Yogyakarta

ARTICLES INFORMATION

E B B A N K
Vol. 13, No. 2, Desember 2023
Halaman : 19 – 26
© LP3M STIEBBANK
ISSN (online) : 2442 - 4439
ISSN (print) : 2087 - 1406

Keywords :
Regional Financial Independence, Regional Original Revenue, Transfers to Regions and Villages

JEL classifications :

Contact Author :
[a]*bullansalsabilla@unmaha.ac.id*,
[b]*famitaazzakhusna@unmaha.ac.id*,
[c] *edyanan@gmail.com*
[d]*rimalanaula@unmaha.ac.id*

ABSTRACT

This research was conducted with the aim of analyzing the effect of regional original income and transfers to regions and village funds on the financial independence of districts/cities in Riau Province from 2018-2022. The dependent variable used in this study is Regional Financial Independence, then the independent variables are Regional Original Income, Transfers to Regions and Village Funds. This research uses a descriptive method with panel data regression analysis. The data used is secondary data obtained from the Ministry of Finance's website from 2018 to 2022, as many as 12 districts/cities in Riau Province. The analysis tool used is the software program Eviews 10. The results of this study indicate that Regional Original Income has a negative and significant effect on Regional Financial Independence, Transfers to Regions and Village Funds have a positive and significant effect on Regional Financial Independence. From the results of the F test, it shows that Regional Original Income, Transfers to Regions and Village Funds together have a positive and significant effect on Regional Financial Independence.

PENDAHULUAN

Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (dalam perkembangannya kedua regulasi ini diperbaharui dengan UndangUndang No. 32 tahun 2004 dan UU No 33 tahun 2004 sebagai tanda pelaksanaan otonom daerah menjadi aturan baru antara pemerintah pusat dengan daerah. Pemerintahan daerah diberikan keleluasan dalam kewenangan untuk mengelola sumber daya yang ada.

Pada tahun 1999 pemerintah daerah melaksanakan perubahan Bersama dengan pengelolaan keuangan dengan menetapkan UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian revisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 yang direvisi menjadi UU No. 33 Tahun 2004 tentang pengelolaan keuangan daerah. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 dijelaskan mengenai pembagian dan pembentukan daerah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersifat otonom dan menerapkan asas desentralisasi. Penerimaan wujud dari tanggung jawab dan hak yang diberikan kepada pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah adanya hak dalam mengatur daerah wewenangnya mulai dari keuangan atau bagian lainnya disebut dengan otonom daerah.

Dengan adanya otonomi daerah, maka jumlah urusan yang menjadi hak dan kewajiban pemerintah daerah akan bertambah. Untuk melakukan itu, kita membutuhkan sumber daya, termasuk sumber daya keuangan. Dalam pelaksanaan pendanaan pemerintah daerah, dana harus bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD memiliki tiga struktur: sisi penerimaan, sisi pengeluaran dan sisi penggalangan dana. Di sisi penerimaan APBD terdapat sumber pendapatan daerah berupa pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pendapatan daerah wajib lainnya. Dana ditransfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sebagai dana pemerataan. Transfer ke daerah saat ini merupakan pendapatan transfer terbesar dari daerah, dan daerah mengandalkan penerimaan transfer daerah dari Dana Perimbangan.

Menurut Afrizal (2019) Oleh karena itu, dalam era otonomi daerah, pengelolaan keuangan secara optimal harus dilakukan agar secara bertahap dapat mengurangi tingkat ketergantungan terhadap swadana daerah. Sejak fenomena masa lalu, yaitu ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sampai saat ini konsep pemerintahan daerah yang benar dan bertanggung jawab belum terwujud. Ketergantungan pemerintah daerah pada dana transfer pusat terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, termasuk kabupaten/kota di Provinsi Riau.

Menurut Tilawatil dan Rina (2019), Kemandirian keuangan daerah diukur dari tingkat PAD relatif terhadap pendapatan daerah dari sumber lain seperti pendapatan. Misalnya: dukungan atau pembiayaan pemerintah pusat. Salah satu faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah adalah pajak dan tarif daerah. Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting untuk mendanai praktik pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk menciptakan otonomi daerah yang luas, realistis dan bertanggung jawab. Berikut ini grafik pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Riau pada tahun 2022:

Gambar 1. Jumlah PAD pada kabupaten/kota di Provinsi Riau tahun 2022

Sumber: https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd dan diolah, 2023

Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2022 kabupaten/kota Riau diperkirakan akan terus mengalami peningkatan dan penurunan pendapatan asli daerah secara signifikan. Pendapatan daerah tertinggi adalah Kabupaten/Kota Pekanbaru sebesar 656,43 miliar dan terendah Kabupaten/Kota Pelalawan sebesar 73,36 miliar. Sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial perlu dipertimbangkan secara hati-hati, namun tentu saja tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pajak dan retribusi daerah yang telah lama menjadi komponen utama dalam menghasilkan pendapatan asli daerah, harus dipertimbangkan dalam kerangka tersebut.

Adapun faktor-faktor yang perbedaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara Kota Pekanbaru dan Kota Pelalawan, diantaranya:

a) Struktur ekonomi: Kota Pekanbaru memiliki lebih banyak industri dan sektor bisnis yang menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan Kota Pelalawan
b) Tingkat pengembangan: Kota Pekanbaru memiliki tingkat pengembangan yang lebih tinggi dibandingkan Kota Pelalawan, yang membuat PAD nya lebih tinggi
c) Demografi: Kota Pekanbaru memiliki jumlah penduduk yang lebih besar dibandingkan Kota Pelalawan, yang membuat PAD nya lebih tinggi.
d) Potensi sumber daya alam: Kota Pelalawan memiliki potensi sumber daya alam yang lebih besar dibandingkan Kota Pekanbaru, yang membuat PAD-nya lebih rendah.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode deskriptif dengan analisis regresi data panel. Data yang digunakan adalah sekunder yang diperoleh dari *Website* Kementrian keuangan Pada tahun 2018-2022. Populasi yang digunakan adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau dan metode penarikan sampel menggunakan metode *purposive sampling.* Alat analisis yang digunakan adalah program *software* Eviews 10.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	9.053218	(11,46)	0.0000
Cross-section Chi-square	69.12728	11	0.0000

Sumber: Hasil *output* Eviews 12

Dari hasil estimasi di atas dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas *cross section* F sebesar 0.0000 dan nilai *cross section Chi Square* sebesar 0.0000 > α 0,05 yang artinya H0 ditolak. Hasil pengujian in menyatakan bahwa *common effect* adalah model yang paling tepat digunakan. Selanjutnya, dilakukan pengujian untuk menentukan model yang paling tepat antara *common effect* atau *Random effect* dengan menggunakan *Uji Hausman.*

Tabel 2. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.893190	2	0.3881

Sumber : Hasil *output* Eviews 10

Berdasarkan hasil Uji Hausman diatas, dapat dilihat dari nilai probabilitas Cross-section random yakni sebesar 0.3881 nilai tersebut < 0.05, ini berarti H0 diterima dan H1 ditolak. Hasil pengujian ini menyatakan bahwa model yang paling tepat digunakan adalah Random *effect.*

Tabel 3. Hasil Uji Statistik T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PAD	-8.48E-05	8.10E-06	-10.46396	0.0000
TKDD	0.000783	3.13E-05	24.99174	0.0000

Sumber: Hasil *Output* Eviews dan diolah, 2023

Berdasarkan hasil Uji statistik t (Uji Koefisien Regresi Individu) diatas, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Pengaruh PAD terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Nilai probabilitas dari Variabel PAD sebesar 0.0000 < α 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel PAD berpengaruh terhadap Variabel Kemandirian Keuangan Daerah.
2. Pengaruh TKDD terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Nilai probabilitas dari variabel TKDD sebesar 0.0000 < α 0.05. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel TKDD berpengaruh terhadap variabel Kemandirian Keuangan Daerah.

Tabel 4. Hasil Uji F

R-squared	0.924031	Mean dependent var	0.163750
Adjusted R-squared	0.921365	S.D. dependent var	0.135272
S.E. of regression	0.037933	Akaike info criterion	-3.657292
Sum squared resid	0.082017	Schwarz criterion	-3.552575
Log likelihood	112.7188	Hannan-Quinn criter.	-3.616331
F-statistic	346.6528	Durbin-Watson stat	0.713071
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil Eviews 10 dan diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas hasil uji F diatas dapat dilihat bahwa nilai Prob.(F-Statistik) sebesar 0.000000 < α 0.05 yang menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 5. Hasil Uji R^2

R-squared	0.924031
Adjusted R-squared	0.921365
S.E. of regression	0.037933
Sum squared resid	0.082017
Log likelihood	112.7188
F-statistic	346.6528
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Hasil Output Eviews 12 dan diolah, 2023

Dari tabel diatas diperoleh nilai R-Squared sebesar 0.924031 Hasil ini menunjukkan bahwa variabel Kemandirian keuangan daerah dapat dijelaskan oleh variabel PAD, TKDD sebesar 92.2312% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Berikut ini adalah persamaan estimasi dengan model *common effect:*

Y= -8.48E-05 +0.000783X1 + 0.118964X2

Keterangan:

Y = Kemandirian keuangan Daerah X1= Pendapatan Asli Daerah

X2= Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Hasil dari estimasi regresi menggunakan data panel menunjukkan bahwa koefisien variabel PAD berpengaruh negatif sedangkan TKDD berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Hasil interpretasi di atas dapat menjelaskan adanya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, yaitu sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 0.118964 mengartikan bahwa jika PAD(X1), TKDD (X2) bernilai 0, maka Kemandirian keuangan Daerah(Y) bernilai 0.118964.
2. Koefisien Pendapatan Asli Daerah (X1) sebesar -8.48E.-05 menunjukkan bahwa hubungan negatif antara PAD dan Kemandirian Keuangan Daerah. Jika PAD menurun 1% maka Kemandirian Keuangan Daerah menurun sebesar 8.48%. PAD adalah pendapatan yang diperoleh seseorang atau badan yang menggunakan pelayanan atau fasilitas pemerintah daerah berdasarkan peraturan yang berlaku. Pendapatan asli daerah digunakan untuk mendanai pembangunan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang dapat mempengaruhi kemandirian daerah. (Mahardika & Fauzan, 2022).
3. Koefisien TKDD (X2) sebesar 0.000783 menunjukkan bahwa TKDD meningkat satu juta, maka Kemandirian Keuangan Daerah akan meningkat sebesar 783% dengan asumsi variabel lain dianggap tetap. Koefisien TKDD bernilai positif mengartikan bahwa terjadi hubungan positif TKDD dan Kemandirian Keuangan Daerah. TKDD menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini didukung oleh penelitian Elmiza dan Arza (2020) yang menemukan bahwa dana transfer juga berdampak positif terhadap kinerja keuangan pemerintah desa. Oleh karena itu, semakin tinggi dana transfer dan dukungan total dari pemerintah pusat, semakin rendah tingkat kemandirian desa dan semakin rendah pula kemampuan keuangan pemerintah.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Variabel PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
2. Variabel TKDD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
3. variabel PAD dan TKDD secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, adapun saran yang ditujukan bagi pemerintah maupun peneliti selanjutnya, yaitu:

1. Bagi pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Riau, agar memperbaiki kondisi perekonomian masyarakat daerah demi terwujudnya optimalisasi PAD dan TKDD.
2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dieksplorasi lebih lanjut dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti koefisien PDRB yang mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah, penambahan sampel penggunaan, atau perpanjangan periode pengamatan. riset.

DAFTAR PUSTAKA

Andriani, R. N. R., & Wahid, N. N. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi*, *13*(1), 30–39.

Arpani, W. N., & Halmawati, H. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, *2*(1), 2373–2390. https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.218

Astuti, T., & Sunarto, S. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Provinsi D.I Yogyaarta tahun 2008-2013). *Jurnal Akuntansi*, *3*(1), 22 - 32. Retrieved from https://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/41

Ayustin, M., Arso, S. P., & Wigati, P. A. (2019). Kemandirian Keuangan Daerah Yang Dipengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah27 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Periode 2015-2017 (Pada Badan Pusat Statistik Jawa Barat). *Universitas Komputer Indonesia*, *2017*, 1–14.

Baldric Siregar. 2017. Akuntansi Sektor Publik.Edisi 2. Yogyakarta : UPP

BKAD. (2022). *Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Kabupaten Kulon Progo*. BKAD Kulon Progo. https://bkad.kulonprogokab.go.id/detil/1752/transfer-ke-daerah-dan-dana-desa-tkdd- kabupaten-kulon-progo

Carunia, Mulya Firdausy. (2017). Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Daerah. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Darise, N. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta: PT Indeks.

Djpb Riau. (2019). Kajian Fiskal Regional. *Kanwil Ditjen Perbendaharaan Riau*, 1–25.

Fitriana, N., & Sudarti, S. (2018). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Dan Jumlah Penduduk Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, *2*(32), 332–345.

Gozhali, Imam. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.

Halim, Abdul. (2014). Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Jakarta: Selemba Empat.

Imawan, R., & Wahyudin, A. (1). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010-2012. *Accounting Analysis Journal*, *3*(2). https://doi.org/10.15294/aaj.v3i2.4176

Kristina, Siti Raun., Naukoko, Amran T., Siwu, Hanly F. Dj. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli

Daerah (Pad) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah. Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi Vol. 09 No. 1.

Mahardika, Eka Pradana. & Fauzan. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019). Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Vol. 11 No. 1 Juli 2022.

Novianto, R., & Hanafiah, R. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah KAbupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi*, *4*(1), 1–22.

Prasasti, S. E. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Diy Tahun 2007-2013). *Akmenika: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, *12*(1), 1–13.

Tangkilisan, Hessel Nogi S. (2007). Manajemen Publik. Jakarta: Grasindo

Shoba, A. N., & Fidiana. (2022). *Kemandirian Keuangan Daerah Berdasarkan Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Pertumbuhan Ekonomi*. 1–16. www.jatim.bps.go.id

Suhyanto, O., Juanda, B., Fauzi, A., & Rustiadi, E. (2020). Pengaruh Dana Transfer Dana Desa Dan PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Barat. *EKUITAS (JurnalEkonomiDanKeuangan)*,*4*(3),285–305. Https://Doi.Org/10.24034/J25485024.Y2020.V4.I3.4478

Yoda, Tilawatil Ciseta; Febriani, Rina. (2020). Analisis Ketimpangan Kemandirian Keuangan Daerah Menggunakan Indeks Williamson Antarkota Di Sumatera Barat. **Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi**, [S.L.], V. 3, N. 4, P. 369-375, Jan. 2020. Issn 2685-5607.

Tolosang, K. D. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, *18*(3), 79–92.

Wahyuningsih, Y. E. (2016). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh*. *1*(1), 15–29.

---------- halaman ini sengaja dikosongkan ----------